

**SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**  
(Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Ilmu Hukum  
pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**Haidir Ali**

NIM: 10500113120

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haidir Ali  
Nim : 10500113120  
Tempat tanggal lahir : Makassar, 25 Januari 1994  
Jurusan/ Konsentrasi : Ilmu Hukum/ Pidana  
Alamat : Jl. Benteng Somba Opu, Perumahan Graha Sejahtera  
blok i/8, Pallangga - Gowa  
Judul : Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika  
Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan  
No.24/Pid.Sus-Anak/2015 PN Sungguminasa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 24 Maret 2017

Penyusun

**HAIDIR ALI**  
**NIM. 10500113120**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)", yang disusun oleh Haidir Ali, NIM: 10500113120, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 29 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata 29 Maret 2017 M  
1 Rajab 1438 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hj. Rahmatiah HL., M.Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Kasjim Salenda, M.Th.I.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hamsir, M.Hum.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAKASSAR

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadiran Allah swt, yang senantiasa melimpahkan *Taufiq* dan *Hidayah*-Nya, sehingga proses penyusunan skripsi yang berjudul “ ***SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)*** “ ini dapat terselesaikan meskipun dalam pembahasan dan uraian yang sangat sederhana. *Shalawat dan Taslim* semoga senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Besae Muhammad saw, sebagai *Rahmatan lil alamin* dan *Uswatun hasanah* bagi umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik berupa motivasi yang bersifat moril maupun materil, penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud. Sederetan nama dan pihak maupun lembaga yang sangat berjasa telah dengan ikhlas memberikan bantuan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyelesaian studi penulis di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN). Karena itu, merupakan suatu kewajiban penulis untuk mengucapkan terimakasih yang setinggi – tingginya.

Pertama-tama penulis haturkan terima kasih yang setinggi – tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh Wakil Rektor.

2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta seluruh Wakil Rektor.
3. Istiqamah, SH, MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Rahman Syamsuddin, SH, MH. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Para segenap Dosen, Staf dan karyawan/karyawati atas segala kontribusi ilmiah, bimbingan dan pelayanan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu.
5. Dr. H. Kasjim Salenda, M.Th.i dan Dr. Hamsir, SH, MH selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membuka cakrawala berfikir penulis dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini sejak awal penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag dan Dr. Hj. Rahmatiah HL., M.Pd selaku penguji ujian seminar hasil dan ujian munaqasyah.
7. Dr. Muh Sabir, M.Ag, Dr. M Thahir Maloko, M.Hi, dan Dr. Hamsir, M.Hum selaku Penguji program studi/ komprehensif.
8. Bapak Kepala Pengadilan Negeri Sungguminasa beserta staf dan jajarannya yang telah bersedia menerima dan membantu penulis ketika melaksanakan penelitian, terkhusus kepada bapak Amran S Herman SH,MH selaku Hakim pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.

Adapun penghargaan utama dan ucapan terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Drs. Abd Mansyur Sarro dan Ibunda Tersayang Hj. St. Aisyah Atas segala kasih sayang dan jerih payahnya mengasuh, mendidik, dan membesarkan penulis sejak kecil dan yang tak henti – hentinya mendoakan dengan pengorbanan lahir batin.
2. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada kakanda–kakanda kandung penulis Ismail Taba, Milawaty, Ardiansyah, Suryansyah, dan Haedar Ali atas dukungannya baik bersifat moril maupun materil selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
3. Rekan–rekan di Pengurus HMJ IH 13, HMI Kom. Syariah dan Hukum, dan Wana Lestari Indonesia.
4. Sahabat seperjuangan dibangku perkuliahan Imam, Araf, Aidil, Mahmud, Sulhan, Bahar, Tembang, Hasan, Sutrisno, Hani, Rene, Riza, Ila serta seluruh sahabat penulis di Ilmu Hukum kelas C 2013, dan segenap Ilmu Hukum MEDIASI angkatan 2013 yang penulis tak bisa sebut satu persatu.
5. Sahabat seperjuangan KKN, posko dusun pajalele desa binanga karaeng Syahrul, Haerul, Ilo, Nidar, Tina, Bil, Riska, Nana, Maman, Ija, Ulla, khususnya kepada ibu posko 12 kak Jumriah dan adik Aira, serta seluruh seperjuangan KKN 53 Kec.Lembang – Pinrang, serta terkhusus Nurhanisah yang selalu mendukung dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan proses akhir perkuliahan.
6. Sahabat masa remaja sampai dengan dewasa ini Anca, Sam, Ahmad, Acil, Aswar, Ryan, Hadi, Sakinah.

Atas segala bantuan mereka, penulis hanya dapat berdoa semoga Allah jualah yang dapat memberikan imbalan yang setimpal berupa pahala dan semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang dirahmati Allah swt dan menjadikan kita cinta kepada ilmu dan dapat diamalkan pada Masyarakat, Bangsa, dan Negara. Aamiin.

Makassar, Maret 2017

*Penulis*

HAIDIR ALI



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1-11
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	12-45
A. Narkotika .....	12
1. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaannya .....	12
2. Jenis dan Penggolongan Narkotika.....	15
3. Faktor – Faktor Penyebab terjadinya Penyalahgunaan narkotika.....	17
4. Bahaya dan Akibat penyalahgunaan narkotika.....	19
5. Narkotika dalam Pandangan Islam .....	21
B. Anak.....	25
1. Pengertian Anak.....	25
2. Hak – Hak Anak .....	28
3. Perlindungan Anak .....	31
4. Kenakalan Anak.....	34
C. Sanksi dalam Hukum Pidana .....	36
1. Hukum pidana.....	36
2. Sanksi Hukum .....	39
3. Sanksi terhadap Anak .....	40
D. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	42



<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	46-49
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Sumber Data .....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	47
E. Instrument Penelitian .....	48
F. Teknik Pengolahan dan Analis Data.....	48
G. Pengujian Keabsahan Data... ..	49
<b>BAB IV PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PADA KASUS PUTUSAN NO.24/PID.SUS-ANAK/2015/PN SUNGUMINASA DAN SANKSI HUKUMANYA</b> .....	50-78
A. Ketentuan sanksi terhadap Anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkotika pada kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa .....	50
B. Peranan Hakim dalam membuktikan anak yang menyalahgunakan narkotika pada kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa.....	61
C. Efek Jera terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika pada penerapan sanksi yang diberikan oleh Hakim pada kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	79-82
A. Kesimpulan.....	79
B. Implikasi Penelitian.....	81
<b>KEPUSTAKAAN</b> .....	83
<b>LAMPIRAN</b> .....	86
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	87

## ABSTRAK

**Nama : Haidir Ali**

**NIM : 10500113120**

**Judul : Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak  
Dibawah Umur (studi kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN  
Sungguminasa).**

---

Pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu: 1) Bagaimana ketentuan sanksi terhadap anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa? 2) Bagaimana peran Hakim dalam membuktikan anak yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa? 3) Apakah pada penerapan sanksi yang diberikan oleh Hakim pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa telah menimbulkan efek jera?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan bersifat normatif – empiris yakni mengkaji kolerasi antara kaidah hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang–undangan dengan kaitannya terhadap peristiwa hukum pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) ketentuan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sgm, hanya dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) yang hanya dapat diberi masa paling lama 1/2 dari ancaman pidana orang dewasa. 2) Peran Hakim dalam membuktikan anak yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sgm sebelum memberikan sanksi maka perlu dilandaskan pada alat bukti yang sah yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa itu sendiri, surat, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. 3) Efek jera yang ditimbulkan pada penerapan sanksi yang diberikan oleh Hakim terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika pada putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sgm, terbilang kurang efektif menimbulkan efek jera.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terutama orang tua harus lebih memberikan moral dan pelajaran agama bagi si anak agar tidak melakukan tindak pidana. 2) Perlu adanya penyatuan visi penyidik, jaksa penuntut umum, Hakim anak, serta pekerja pembinaan anak terhadap penanganan penyelesaian perkara anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika agar sedapat mungkin mendapatkan pembinaan yang serius agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan mendukung pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika yang sekarang sudah termasuk dalam kategori *extra ordinary crime*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.<sup>1</sup>

Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan salah satunya digunakan kebijakan hukum pidana.<sup>2</sup> Dengan landasan tersebut di atas maka semua warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum harus tunduk pada aturan yang berlaku, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*). Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap

---

<sup>1</sup>Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana dan ICCE UIN Jakarta, 2012), h.121.

<sup>2</sup>Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa media, 2013), h. 1

tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.<sup>3</sup>

Kehidupan masyarakat Indonesia semakin mengalami perkembangan yang kian meningkat dari tahun ketahun. Perkembangan ini diiringi dengan berkembangnya tindak kriminal yang membawa dampak yang dapat merugikan diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum harus difungsikan untuk menjadi alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati sehingga eksistensi negara bisa terwujud secara konsisten.

Dalam pada itu yang menjadi keprihatinan sebagai bangsa saat ini adalah permasalahan perilaku anak baik sebagai pelaku maupun korban dari perbuatan melanggar hukum, seperti masalah yang dijumpai pada masyarakat yang kian berkembang saat ini salah satunya mengenai penyalahgunaan narkoba. Dimana pada

---

<sup>3</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Makassar: Mitra wacana media, 2014), h. 69-70.

kenyataannya sekarang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga sudah melibatkan kalangan anak dibawah umur.

Pada era modern sekarang penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Anak yang sebagai bagian dari generasi muda sepatutnya merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

Secara merata berdasarkan pantauan penulis melalui berbagai media, kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak telah menjamur menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar maupun dikota kecil. Data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di Provinsi Sulawesi Selatan berada di tingkat ke 6 dari 33 Provinsi di Indonesia terbanyak dan paling aktif menggunakan narkotika, diantaranya tahun 2007 – 2011 paling banyak berada di sekolah menengah atas (SMA) dengan jumlah 301 anak, peringkat selanjutnya ialah sekolah menengah pertama (SMP) sejumlah 187 anak.<sup>4</sup> Demikian pula di Kabupaten Gowa kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak semakin marak

---

<sup>4</sup> Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Makassar : Alauddin university pers, 2014), h.6.

terjadi, yakni data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di kabupaten Gowa dari tahun 2010 sampai dengan 2015 ada sekitar 25 kasus, diantaranya 10 kasus yang sampai pada proses penyelesaian perkaranya di tahap peradilan di pengadilan Negeri Sungguminasa dan 15 kasus lainnya proses penyelesaian perkaranya hanya sampai pada proses penyidikan oleh kepolisian Resort Gowa dengan pengupayaan *Diversi* yakni proses penyelesaian diluar proses pengadilan dengan tindakan pengembalian ke orang tua untuk bekerja sama dengan pihak pembinaan anak dan Badan Narkotika Negara (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi.

Adapun Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara telah diatur dalam undang - undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang telah dicabut dan diubah didalam undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan untuk kalangan anak yang berhadapan dengan pelanggaran hukum telah diatur dalam undang – undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam undang – undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Latar belakang lahirnya undang – undang narkotika dalam pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang

optimal, sedangkan lahirnya undang – undang sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat mengisi ruang keadilan sehingga anak tetap bermartabat sebagaimana anak adalah aset bangsa yang harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berpotensi, berperan dan turut menikmati pembangunan nasional menuju tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Dengan demikian diharapkan dengan dirumuskannya undang – undang tersebut dapat menanggulangi adanya penyalahgunaan narkoba dan bagi anak yang terlibat dengan pelanggaran hukum dapat mendapatkan keadilan, serta menjadi acuan dan pedoman kepada para penyelenggara dan pelaksana putusan sanksi dipengadilan, khususnya Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, Maka penulis akan meneliti tentang sanksi hukum yang diterapkan terhadap anak dibawah umur yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba yang proses penyelesaian perkaranya sampai pada proses pengadilan di Negeri Sungguminasa kab.gowa, serta mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul :

**“Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur (studi kasus Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)”.**

---

<sup>5</sup>Anshori Dhio , 2013, *Peradilan Anak: Artikel Peradilan Anak*, [www.peradilananak.blogspot.com](http://www.peradilananak.blogspot.com) (diakses 25 mei 2016, 22.15 WITA).

Penulisan ini dilakukan agar pembaca mengetahui bagaimana ketentuan sanksi hukum bagi anak yang menyalahgunakan narkoba pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa, serta bagaimana dalam proses penyelesaian perkaranya yakni peran Hakim dalam membuktikan anak yang menyalahgunakan narkoba pada kasus No.24/Pid.Sus-Anak/PN Sungguminasa, serta menganalisa penerapan sanksi yang diberikan oleh Hakim pada perkara tersebut apakah telah memberikan efek jera terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba pada kasus tersebut.

#### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur. Mengenai gambaran fokus penelitian yang hendak diteliti oleh penulis yang pertama adalah ketentuan sanksi bagi anak yang menyalahgunakan narkoba pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa. Selanjutnya fokus penelitian kedua adalah peran Hakim dalam membuktikan anak yang menyalahgunakan narkoba pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa. Serta fokus penelitian ketiga adalah efek jera terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba pada penerapan sanksi yang diberikan oleh hakim pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN sungguminasa.



### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur. Selanjutnya penulis jabarkan dalam sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan sanksi terhadap anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkoba pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa ?
2. Bagaimana peran Hakim dalam membuktikan anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkoba pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa ?
3. Apakah penerapan sanksi yang diberikan oleh Hakim terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa telah menimbulkan efek jera ?

### ***D. Kajian Pustaka***

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur, belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Namun adapun literatur–literatur yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi ini yang mengenai diantaranya adalah sebagai berikut :

1. **Taufik Makarao** dalam bukunya *Tindak Pidana Narkoba*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan

pengaruh–pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya dan apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu terhadap kesadaran sipemakai.<sup>6</sup>

2. **Wahyuni Ismail** dalam bukunya *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika diluar dari medis dimana hasil tersebut sangat membahayakan fisik dan mental.<sup>7</sup>
3. **Abdussalam** dan **Adri Desasfuryanto** dalam bukunya *Hukum Perlindungan Anak*, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak). Mengenai anak yang dalam perkara yakni anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan undang–undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>8</sup>
4. **Marwan Setiawan** dalam bukunya *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, menjelaskan bahwa timbulnya kenakalan anak dan remaja bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata –

---

<sup>6</sup> Taufik Makkarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.16-17.

<sup>7</sup> Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Makassar : Alauddin University Press, 2014), h. 145-147.

<sup>8</sup> Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016), h.5.

mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Dengan demikian perlu mendapat pengawasan dan bimbingan dari semua pihak agar remaja tidak terjerumus dalam kenakalan yang bersifat serius.<sup>9</sup>

5. **Maidin Gultom** dalam bukunya *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasannya kekurangan matangan fisik, mental dan sosialnya. Anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang melakukan tindak pidana.<sup>10</sup>
6. **Teguh Prasetyo** dalam bukunya *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, menjelaskan bahwa bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa

---

<sup>9</sup> Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h.5.

<sup>10</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.77.

yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai penjatuhan vonis oleh hakim.<sup>11</sup>

7. **Koesno Adi** dalam bukunya *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, menjelaskan bahwa dapat dikemukakan sanksi terhadap anak dalam KUHP pada intinya adalah adanya kemungkinan putusan tanpa pemidanaan, adanya keterlibatan lembaga atau pihak swasta dalam pelaksanaan putusan, dan adanya larangan penjatuhan pidana yang sangat berat kepada pelaku anak.<sup>12</sup>

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Sesuai dengan pokok masalah diatas terangkum tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan sanksi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa.

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013), h.78-79.

<sup>12</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2015), h.11-12.

2. Untuk mengetahui peran Hakim dalam membuktikan anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkoba pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa.
3. Untuk mengetahui efek jera pada penerapan sanksi yang diberikan oleh Hakim terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa.

Adapun kegunaan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan dunia ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan Praktis, hasil penulisan penelitian ini diharapkan berguna sebagai sarana untuk memperluas wawasan dibidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, terutama mengenai sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Narkotika***

##### **1. Pengertian Narkotika dan penyalahgunaannya**

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*narcosis*” yang berarti membius yang sifat zatnya berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran dan halusinasi.

Dalam ketentuan undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Serta dalam penjelasan umum atas undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, berikut adalah pandangan dari para ahli hukum mengenai pengertian narkotika sebagai berikut:

**Sudarto**, mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa – apa.

**Smith kline** dan **French Clinical Staff**, mengemukakan definisi tentang narkotika adalah zat–zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat–zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat–zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).

Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “*narcotic identification manual*“, mengemukakan bahwa narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat–zat yang bahan mentahnya diambil dari benda–benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain, dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat–zat, obat–obat yang tergolong dalam hallusinogen dan stimulant.<sup>1</sup>

**Oakley Rey** dalam bukunya *Drugs, society, and human behavior* mengemukakan bahwa narkotika adalah obat yang diproduksi dan dijual secara ilegal untuk umum. Obat tersebut hanya dapat digunakan terhadap seseorang yang memiliki penyakit tertentu dan digunakan dengan izin dari pihak kesehatan dengan pengawasan yang ketat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Taufik Makkarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.17-18.

<sup>2</sup> Oakley Rey dan Charles Ksir, *Drugs, society, and human behavior*, (New York: Mc Graw Hill Higger Education, 2004), h. 96

**Al-Ahmady Abu An-Nuur**, mengungkapkan bahwa narkoba ialah zat yang digolongkan sejenis minuman khamar, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia, yang dapat melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya.<sup>3</sup>

**Gardon** (2000) mendefinisikan penyalahgunaan adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Hal ini selaras dengan definisi dari Kementerian Sosial yang menyebutkan penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan seseorang diluar tujuan pengobatan dan atau ilmu pengobatan (Departemen Sosial,2003).

**Yunita** (2010) mengatakan penyalahgunaan narkoba adalah suatu pemakaian non-medis yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan produktif manusia pemakainya.<sup>4</sup>

Manakala menurut undang – undang No.22 tahun 1997 tentang narkoba, mendefinisikan penyalahgunaan adalah penggunaan narkoba (narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) tanpa pengetahuan dan pengawasan dokter. Mengikut ketentuan umum undang – undang No.35 tahun 2009, Penyalahguna adalah Orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.79-80.

<sup>4</sup> Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Makassar: Alauddin university pers, 2014 ), h.145-146.



## 2. Jenis dan Penggolongan Narkotika

Jenis-jenis narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 undang - undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika golongan 1 : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. seperti *tanaman papaver somniferum L, Opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, tetrahydrocannabinol*.
- b. Narkotika golongan 2 : Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. seperti *Alfasetilmetadol, alfametadol, alfaprodina, alfentanil, allilprodina, betametadol, dimenoksadol, benzetidin*.
- c. Narkotika golongan 3 : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. seperti *Asetildihidrokodeina, dekstropropoksifena, dihidrokodeina, etilmorfina, nikodikodina, polkodina*.

Menurut **Moh. Taufik Makkarao**, berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai karakteristiknya masing-masing yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat apabila terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, sebagai berikut :

- a. *Candu* atau disebut juga dengan *opium*, berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain *opium* adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang

mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranqlizers*. *Depressants*, yaitu merangsang system syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

- b. *Morphine*, adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi, bahan *morphine* dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan.
- c. *Heroin*, berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti yang telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codein, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau. Zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi dengan dosis yang lebih, bahkan bisa menyebabkan kematian seketika.
- d. Ganja, berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*. Sejenis dengan *mariyuana* adalah *hashish* yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari *hashis* lebih kuat dari pada ganja.
- e. *Narkotika sintetis* atau buatan, adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara *farmakologi* yang sering disebut dengan istilah *NAPZA*, yaitu kependekan dari *Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif* lainnya. *NAPZA* tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Taufik Makkarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.21-27.

### **3. Faktor–Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika**

Pada umumnya secara keseluruhan faktor–faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal , sebagai berikut :

#### **a. Faktor Internal Pelaku**

- 1) Perasaan egois, merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.
- 2) Kehendak ingin bebas, sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma–norma yang membatasi kehendak bebas ini muncul dan terwujud dalam perilaku setiap kali seseorang dihipnotis beban pemikiran dan perasaan.
- 3) Kegoncangan jiwa, hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dalam dihadapi dan diatasinya.
- 4) Rasa keingintahuan, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda. Perasaan ini tidak terbatas pada hal–hal yang positif, tetapi juga kepada hal–hal yang sifatnya negatif.

#### **b. Faktor Eksternal Pelaku**

Faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut :

- 1) Keadaan ekonomi, keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang baik atau miskin. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.
- 2) Pergaulan dalam lingkungan, pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.
- 3) Kurangnya pengawasan, pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Disini keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Taufik Makkarao, dkk., *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.48-56.

#### 4. Bahaya dan akibat penyalahgunaan Narkotika

Bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika dapat bersifat bahaya pada pribadi bagi sipemakai maupun dapat berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu secara umum dan khusus, secara umum dapat menimbulkan pengaruh efek-efek terhadap tubuh sipemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut :

- a. *Euphoria*, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan sipemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
- b. *Delirium*, suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakainya (biasanya pemakaian dosis lebih banyak dari pada keadaan *euphoria*).
- c. *Hallusinasi*, suatu keadaan dimana sipemakai narkotika mengalami “ khayalan “, misalnya melihat dan mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
- d. *Weakness*, kelemahan yang dialami fisik atau psychis atau kedua-duanya.
- e. *Drowsiness*, kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, dan mengantuk.
- f. *Coma*, keadaan sipemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Bahaya dan akibat secara khusus terhadap sipemakai, yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri dapat menimbulkan efek-efek sebagai berikut:

- a. *Heroin*, dapat menimbulkan tampak ngantuk, bicara cadel dan apatis, jalan sempoyongan dan gerak melamban, daya ingat dan perhatian terganggu, tubuh menjadi kurus, pucat dan kurang gizi.
- b. *Ecstasy, Methamphetamine* dapat menimbulkan denyut jantung dan nadi bertambah cepat, gerak anggota badan tak terkendali, kemampuan berempati meningkat, keintiman bertambah dan rasa percaya diri meningkat, penglihatan kabur, dan berhalusinasi.
- c. Ganja, dapat menimbulkan kedua mata merah dan mulut kering, banyak keringat, kecemasan dan kecurigaan bertambah, nafsu makan bertambah, euphoria, apatis, dan perasaan waktu berjalan lambat.
- d. *Sedativa/Hipnotika*, dapat menimbulkan banyak bicara, pengendalian diri berkurang atau melemah sehingga mudah tersinggung dan terlibat perkelahian.

Bagaimanapun penyalahgunaan narkotika, bahaya dan akibat sosial akan lebih besar dibanding bahaya yang bersifat pribadi. Karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara dimasa dan generasi mendatang, bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan, meningkatnya kriminalitas, serta pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Taufik Makarao, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), h.48-56.

## 5. Narkotika dalam pandangan Islam

Dalam dunia Islam, respon awal terhadap narkotika berawal dari pemikiran muslim yang terjadi pada abad 7 (tujuh) hijriah. **Ibnu Taimiyah**, seorang ulama terkemuka dari Syria menyatakan bahwa obat bius (narkotika) yakni semacam candu dan ganja jauh lebih berbahaya daripada minuman keras (khamar). Menurut Ibnu Taimiyah, narkotika layak diharamkan karena sangat berbahaya bagi masa depan umat manusia. Ibnu Taimiyah yang mengemukakan obat bius (narkotika) sangat berbahaya bagi masyarakat, sebab pada saat itu Ibnu Taimiyah memandang mudarat dari obat bius (narkotika) tersebut yang sangat merugikan masyarakat Mesir yakni ketika seseorang telah menggunakan obat bius (narkotika) tersebut banyak muncul kerusuhan dan kejatan yang terjadi disebabkan pengguna obat bius (narkotika) tersebut tidak dapat mengendalikan dirinya (mabuk).

**Ibnu Qayyim**, murid dari Ibnu Taimiyah, tergugah untuk meneruskan perjuangan gurunya dalam memerangi khamar dan narkotika. Menurutnya, khamar ialah semua yang bahan yang memabukkan, baik cair maupun padat, baik dari perasan buah maupun sari masakan. Khamar, narkotika menurut Islam dapat menggelapkan dan mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi dan hati nurani menjadi gelap dan keruh, maka derajat manusia bisa turun ke level paling

rendah (Al- Qur'an mengistilahkanya sebagai *Asfala safilin*), katanlah level binatang.<sup>8</sup>

Narkotika didalam dunia Islam secara tekstual memang tidak terdapat ayat atau hadits yang secara langsung mengharamkan narkotika. Namun perlu diketahui bahwa tidak setiap yang haram dan dilarang meski dia tidak tekstual didalam Al-Qur'an atau Hadits. Terkadang Al-Qur'an hanya menyebutkan dalil umumnya saja. Begitu juga dengan narkotika, narkotika membuat manusia mabuk seperti mengkonsumsi minuman keras atau khamar. Bahkan efek mabuk yang ditimbulkan jauh lebih dahsyat dari pada miras, berarti ada sisi kemiripan alasan dalam mengharamkan narkotika dengan miras (khamar) yaitu kedua-duanya sama-sama memabukkan, memacu kejahatan, merusak jasmani dan rohani. Dengan demikian maka jelas sekali bahwa narkotikapun hukumnya haram sebagaimana miras (khamar).<sup>9</sup>

Adapun dalil-dalil yang mengharamkan narkotika adalah sebagai berikut :

a. Dalil dari Al-Qur'an

Berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika sangat berkaitan dengan penjelasan dalam Q.S. Al-A'raf /7: 157, sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika- Alkohol: cara islam mencegah, mengatasi dan melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004), h. 86-87

<sup>9</sup> Abu Azzam Hawari, 2014, *Petaka dibalik Narkotika*, <https://kafilahtauhid.wordpress.com/petaka-di-balik-narkotika/> (diakses 28mei 2016, 20.00 WITA).



لِيَنبَغُونَ لِرَسُولِهِمُ الْآيَاتِ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الْمَطِيلَاتِ وَيُحَرِّمُ لِيَهُنَّ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَوَأَعْلَلَ الْآيَاتِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَلَا يَنَآمُوا بِهِ  
وَعَزُّوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( ١٥٧ )

Terjemahannya :

“(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis didalam Taurot dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka yang dari mengerjakan yang mungkar dan meghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka . maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.<sup>10</sup>

Adapun dalam potongan ayat “wa yuharrimu’ alaihim al khobaits” yang terjemahannya “Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk“. Jadi telah jelas bahwa segala macam yang buruk telah diharamkan oleh Allah, dan jika narkoba merupakan barang yang buruk dan membahayakan, hanya orang yang akal nya ingin rusak yang ingin mengkonsumsi narkoba.

#### b. Dalil dari Hadits

Adapun dalil Al-hadits yang mengharamkan miras (khamar) yang di samakan golongannya dengan narkoba adalah sebagai berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya toha semarang,2002), h.228.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه البخار ومسلم)

Artinya :

“Semua yang memabukkan adalah khamar, dan semua yang memabukkan hukumnya haram“. (HR. Al- Bukhari dan Muslim)

Dari hadits tersebut jelas bahwa segala yang memabukkan hukumnya haram. Jika dikaitkan dengan masalah narkoba, maka tidak ada satu jenis pun dari narkoba yang tidak memabukkan atau menghilangkan akal manusia. Bahkan lebih memabukkan daripada miras. Dengan demikian maka narkoba dihukumi haram sebagaimana dengan miras (khamar).

Selain hadits diatas masih ada lagi hadits yang dijadikan dalil untuk mengharamkan narkoba, yaitu sebagai berikut :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن المجه وأحمد)

Artinya :

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan (diri) dan membahayakan orang lain“. (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Berdasarkan hadits diatas maka segala perbuatan yang berbahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain apapun jenisnya hukumnya haram. Seperti mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri, mengajak orang memakai, menjual, menawarkan, jelas hukumnya haram karena termasuk golongan dari membahayakan diri sendiri dan orang lain.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Abu Azzam Hawari, 2014, *Petaka dibalik Narkoba*, <https://kafilahtauShid.wordpress.com/petaka-di-balik-narkoba/> (diakses 28mei 2016, 20.00 WITA).

## **B. Anak**

### **1. Pengertian anak**

Anak merupakan tunas bagi bangsa generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki potensi, ciri, sifat, khusus, dan peran strategis yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (pasal 1 *convention on the rights of the child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 butir 1 Undang - undang No.23 tahun 2002 dan Undang - undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).<sup>13</sup>

**J.E. Sahetapi** (1997:44), bahwa anak dibawah umur atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Belum berumur 16 (enam belas) tahun.
- b. Belum kawin, apabilah telah kawin sebelum unur 16 (enam belas) tahun berarti ia telah dewasa dan jika perkawinannnya bubar sebelum ia berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak kembali semula tetapi dianggap tetap dewasa.

---

<sup>12</sup> Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015), h. kata sambutan.

<sup>13</sup> Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016), h.5.

c. Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya.<sup>14</sup>

Dalam Undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 Undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4 Undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

---

<sup>14</sup> Alamsyah Citra Negara, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak, Skripsi (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), h.36.

(pasal 1 angka 5 Undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>15</sup>

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang biasa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam tiga fase, yaitu :

- a. Fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang biasa disebut sebagai anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
- b. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak – kanak, dimana digolongkan kedalam dua periode yaitu masa anak sekolah mulai dari usia 7 sampai 14 tahun adalah periode intelektual dan masa remaja/ pra-pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.
- c. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 39-40.

<sup>16</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), h.7.

## 2. Hak – Hak Anak

Pada tanggal 20 november 1959 sidang umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi tentang hak–hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi Ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak–anak. Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak–hak anak, yaitu :

- a. Anak berhak menikmati semua hak–haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak–haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk itu baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya sendiri, yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- g. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan. masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan, anak tidak boleh dijadikan subyek perdagangan, anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, anak tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam undang - undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 undang – undang No.4 tahun 1979 menentukan :

“ kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak “. <sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.54-56.



### 3. Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan merumuskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Dan perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak oleh Prayuna Pusat 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerinah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0–21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

**Abdul Hakim Garuda Nusantara**, mengatakan masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak – anak Indonesia. Masalahnya tidak semata – mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai berikut :

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan posisif.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis perlindungan anak
- b. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu yang menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, menentukan :

“ Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak “.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan

kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.<sup>18</sup>

#### 4. Kenakalan Anak

Anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (pasal 1 butir 2 Undang - undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).<sup>19</sup>

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya *Young* , anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *Doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, dan lain-lain.

Istilah kenakalan anak pertama kali ditampilkan pada badan peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang peradilan bagi anak dinegara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekan pada segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum

---

<sup>18</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.40-46.

<sup>19</sup> Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : PTIK, 2016), h.5.

melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

**R. Kusumo Setyonegoro**, dalam hal ini mengemukakan pendapatnya tentang *Juvenile Delinquency* antara lain sebagai berikut :

“ Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut criminal”.<sup>20</sup>

**William G. Kvaraceus**, mengatakan: *Most statues point out that delinque behavior contitues a violation of the law or municipal ordinance by a young person under a certain age.*<sup>21</sup> Artinya: status yang menunjukkan perilaku kenakalan anak pada *delinquency contitues* ialah pemuda dibawah usia tertentu yang melakukan pelanggaran hukum.

Dalam undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi digunakan mengenai istilah anak nakal, namun pada pasal 1 angka 3

<sup>20</sup> Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), h .9.

<sup>21</sup> William C. Kvaraceus, *Dynamics of Delinquency*, (Colombus: E.Merrils Books, 1966), h.31

itu sendiri menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang melakukan tindak pidana.<sup>22</sup>

### ***C. Sanksi dalam Hukum pidana dan sanksi terhadap anak***

#### **1. Hukum pidana**

Hukum pidana dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk memformulasikan sekumpulan aturan yang didalamnya mengandung hal-hal perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dengan ancaman sanksi hukuman apabila larangan tersebut dilanggar.<sup>23</sup>

**Soedarto**, Hukum Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang–Undang Hukum Pidana, sengaja agar diberikan sebagai nestapa. Dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan–perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat–syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi disini negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan – perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

---

<sup>22</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.68.

<sup>23</sup> Aims, dkk., *Hukum Pidana*, (Malang: Setara press, 2016), h.50.

- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.<sup>24</sup>

**Alf Ross**, menyatakan bahwa hukum pidana adalah *punishment is that social response on rule*.<sup>25</sup> ( hukuman merupakan respon sosial dari aturan)

- *Occur where there is violation of a legal rule.* (terjadi dimana ada pelanggaran aturan hukum)
- *Is imposed and carried out by authorized persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs.* (diberikan dan dikenakan hukuman oleh pihak yang berwenang atas aturan yang dilanggar)

**Moeljatno**, Hukum Pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukuman yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk sebagai berikut :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Makassar: Mitra wacana media, 2014) , h.191.

<sup>25</sup> Alf Ross, *On quilt, Responsibility and Punishment*, (London: steven and sons Ltd, 1995), h.39

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), h.5.

Selanjutnya **Mr. Tirtaamidjaja** menjelaskan Hukum Pidana materiil dan Hukum Pidana formil sebagai berikut :

“ Hukum Pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Hukum Pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim”.<sup>27</sup> Hukum Pidana formil ini biasanya disebut “ Hukum Acara Pidana “ yang dalam bahasa belanda di istilahkan dengan *strafprocesrecht*, sedangkan dalam bahasa inggris di istilahkan dengan *criminal procedure*.<sup>28</sup>

Selain pembagian hukum pidana yang telah dijelaskan diatas, **Simons** membagi hukum pidana atas hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang disebut *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman, yang disebut *ius poeniendi*.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Asas – Tteori – Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.2.

<sup>28</sup> Aims, dkk., *Hukum Pidana*, (Malang: Setara press, 2016), h.3.

<sup>29</sup> Simons, *Geschiedenis van het wetboek van strafrecht*, (Batavia: Noorhoff, 1935). h.11



## 2. Sanksi Hukum

Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang.<sup>30</sup> Sedangkan, Sanksi Hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum dan merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.<sup>31</sup> Sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan Undang-Undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.<sup>32</sup> Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Walaupun sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>33</sup> Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan dan

<sup>30</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 23

<sup>31</sup> Reynaldi J, 2013, *sanksi hukum*, <http://unhaslaw.blogspot.com/2013/09/penjelasan-mengenai-sanksi-hukum/> (diakses 23 juni 2016, 16.00 WITA).

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa media, 2013), h.79.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), h.185.

menekan unsur pembalasan yang dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan mendidik terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sanksi hukum adalah monopoli hak penguasa ataupun pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karenanya perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya kita tidak boleh memukuli seorang pencuri yang tertangkap, menyita barang – barang orang yang teutang kepada kita ataupun menyandera orang untuk melunasi utangnya, dan lain – lainnya. Tindakan tseperti itu adalah tindakan menghakimi sendiri atau main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>34</sup>

### **3. Sanksi terhadap Anak**

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan anak, seyogianya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim tunggal anak, dan petugas lembaga pembinaan anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Dalam memberikan sanksi terhadap anak yang diberikan oleh Hakim, tidak lain pula dimaksudkan untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

---

<sup>34</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.24-25

Secara umum dalam Undang – Undang Sistem peradilan pidana anak, merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di LPKS, pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak bila perbuatan pelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat lainnya, yakni Pidana Penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak hanya boleh maksimal 2 (dua) tahun. Hakim juga dapat memberikan syarat meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan pelanggaran hukum, maka hakim dapat memberikan kebebasan bersyarat pada anak tersebut.

Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat – akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.156-162

#### ***D. Sistem Peradilan Pidana Anak***

Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Peradilan pidana anak menegakkan hak-hak anak baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegakan hak-hak anak ini diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (pasal 1 angka 1 UU SPPA). Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Peradilan pidana anak masih dibawah ruang lingkup peradilan umum. Secara intern dilingkungan peradilan umum dapat ditunjuk Hakim yang khusus mengadili perkara-perkara pidana anak. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental, dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-Undang. Peradilan tidak hanya menjatuhkan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak.

Pasal 2 UU SPPA menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Undang-Undang pengadilan anak dalam pasal-pasal nya juga menganut beberapa asas yang membedakan dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembatasan umur (pasal 1 angka 3 UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Ruang lingkup masalah dibatasi, masalah yang diperiksa disidang pengadilan anak hanyalah menyangkut perkara anak saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain diluar pidana bukan wewenang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak.
- c. Ditangani pejabat khusus, perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, penuntut Umum anak, dan Hakim anak.
- d. Peran pembimbing kemasyarakatan, UU SPPA mengakui peranan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial relawan

- e. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan, pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum tidak memakai Toga.
- f. Keharusan *splitsing*, anak tidak boleh disidangkan/ diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer
- g. Acara pemeriksaan tertutup, acara pemeriksaan di pengadilan anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat 3 KUHAP dan pasal 54 UU SPPA)
- h. Diperiksa oleh Hakim Tunggal, Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan anak yakni dengan Hakim tunggal. Namun apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. (Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 UU SPPA) perkara dapat diperiksa dengan Hakim Majelis.
- i. Masa penahanan lebih singkat, masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam UU SPPA dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- j. Hukuman lebih ringan, hukuman yang dijatuhkan terhadap anak (Pasal 69–83 UU SPPA), lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap anak adalah 10 tahun (Pasal 81 ayat 6 UU SPPA). Hal ini juga bila

ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan anak.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.84–108.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

1. Jenis penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang mengkaji kolerasi antara kaidah hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang – undangan dengan kaitannya terhadap peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat, yakni pemberian sanksi terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur pada putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa.
2. Lokasi penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan alasan bahwa di Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah tempat instansi badan hukum yang memberi penyelesaian perkara dalam bentuk sanksi terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur pada putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif – empiris yaitu penelitian yang mengkaji kolerasi antara peraturan-peraturan yang berlaku yang



dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya dalam putusan kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur.

### ***C. Sumber Data***

Adapun sumber data yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten terkait dengan penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan.
  - a. Bahan hukum primer, berupa undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa, serta kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) dan kitab undang – undang hukum acara pidana (KUHAP).
  - b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, buku, artikel ilmiah, internet, dan lain-lain.
  - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap pihak-pihak terkait dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan majelis hakim di pengadilan negeri sungguminasa.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data lapangan adalah wawancara dan dokumen. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

#### ***F. Teknik pengolahan dan Analisis Data***

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder di kelolah secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan memandang mutu peraturan perundang - undangan terhadap peristiwa hukum yang terjadi yakni dalam pemberian sanksi penyalagunaan narkotika oleh anak dibawah umur pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa. Kemudian data dipaparkan dalam uraian kata-kata secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya berkaitan dengan penulisan ini.

### ***G. Pengujian keabsahan data***

Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai berikut :

- a. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip dan memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
- b. Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



## BAB IV

### PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PADA KASUS PUTUSAN NO.24/PID.SUS-ANAK/2015/PN SUNGGUMINASA DAN SANKSI HUKUMANNYA.

#### *A. Ketentuan Sanksi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menyalahgunakan Narkotika pada Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa.*

Sebelum penulis menguraikan ketentuan sanksi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa, maka penulis terlebih dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/ Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu sebagai berikut :

#### *) Posisi Kasus*

Berawal pada hari senin tanggal 14 agustus 2015 sekitar pukul 19:00 wita pelaku Anak lelaki bernama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** berumur 16 (enam belas) tahun pergi membeli 1 (satu) sachet Kristal bening shabu – shabu pada **Pak Desa** (nama samaran) dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pelaku pulang kerumah tantenya yang pada saat itu sedang kosong untuk mengkonsumsi shabu – shabu tersebut dengan cara pelaku sediakan bahannya selanjutnya shabu – shabu dimasukkan di pipet kaca kemudian dihubungkan atau

disambungkan di pipet plastik yang tertancap pada bong, setelah itu pelaku bakar dan asapnya pelaku isap menggunakan pipet yang tertancap pada bong.

Selang beberapa hari, pada hari selasa tanggal 15 september 2015 sekitar pukul 09:00 wita, petugas kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah pelaku anak lelaki bernama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** di Jl.Poros Limbung sering di tempati pesta Narkoba jenis Shabu – shabu. Dengan adanya informasi tersebut maka petugas kepolisian Ditre Narkoba Polda Sulawesi Selatan satu tim menuju ketempat tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil di depan rumah pelaku dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan melihat pelaku duduk – duduk bersama **Putra**, kemudian ketika mobil tim Ditre Narkoba Polda semakin mendekat dengan pelaku **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan**, pelaku **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** kemudian menjatuhkan bungkusan rokok di kanal sehingga petugas kepolisian satu tim langsung turun dari mobil dan menghampiri pelaku lalu mengambil bungkusan rokok yang dijatuhkan oleh pelaku di kanal dan membuka bungkusan rokok tersebut ternyata berisi 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening yang sehari – harinya disebut shabu – shabu yang diakui pelaku **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** miliknya diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) dari **Pak Desa** (nama samaran) yang tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening pada pusat Laboratorium Forensic Polri cabang Makassar No.Lab: 2172/NNF/VII/2015 tanggal 21 september 2015, yang ditandatangani oleh **Drs. Sulaeman Mappasessu** selaku wakil kepala laboratorium forensic Polri cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto  $\pm 0,1226$  gram, serta urine milik pelaku anak lelaki **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** adalah benar positif mengandung *metafetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berangkat dari kasus posisi diatas, untuk menentukan ketentuan sanksi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika atas nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan**, perlu terlebih dahulu diketahui undang – undang apa saja yang dilanggar anak tersebut, serta perlu diketahui bagaimana ketentuan – ketentuan hukumannya.

Dalam ketentuan undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan anak dibawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dalam ketentuan undang – undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,

anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Adapun ketentuan-ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang di atur dalam Pasal 127 dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut :

- (1) Setiap Penyalahguna :
  - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>1</sup>

Namun perlu diketahui bahwa ancaman pidana pada ketentuan – ketentuan Pasal 127 dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatas hanya berlaku bagi orang yang sudah dewasa saja. Sedangkan apabila ada Anak dibawah umur yang melanggar ketentuan pasal tersebut untuk diberikan sanksi, Hakim harus pula berpedoman pada ketentuan Undang – undang No.11 tahun 2012 tentang sistem

---

<sup>1</sup> Undang - Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

peradilan pidana anak untuk pemberian jenis dan masa sanksi terhadap anak tersebut. Hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogate lex generalis* (asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).<sup>2</sup>

Menurut undang – undang No.11 tahun 2012 terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hanya dapat dijatuhi sanksi pidana dan tindakan, yaitu pada ketentuan pasal - pasal sebagai berikut :

#### Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
  - a. Pidana peringatan
  - b. Pidana dengan syarat :
    - 1) Pembinaan diluar lembaga
    - 2) Pelayanan masyarakat, atau
    - 3) Pengawasan
  - c. Pelatihan kerja
  - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
  - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 72

---

<sup>2</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2015), h.23



Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

#### Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat,
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3(tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar.

#### Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak dibina diluar lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

#### Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan :
  - a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina.
  - b. Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa, atau
  - c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4), pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

#### Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang positif.
- (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

#### Pasal 77

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana pada ayat (1), anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan.

#### Pasal 78

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
- (4) Ketentuan mengenai tindak pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang ini.

#### Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

#### Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :
  - a. Pengembalian kepada orang tua/ wali
  - b. Penyerahan kepada seseorang
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
  - d. Perawatan di LPKS
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  - f. Pencabutan surat izin mengemudi
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 83

- (1) Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Oleh karena demikian ketentuan pada pasal – pasal yang ada dalam undang – undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang bersifat limitatif terhadap ketentuan undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Maka penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur atas nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan**, berdasarkan ketentuan pasal 127 undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika Jo./ *Juncto* (dihubungkan) dengan ketentuan pasal 71 undang – undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yakni merumuskan anak tersebut hanya dapat dijatuhkan sanksi oleh hakim, berupa sanksi Pidana dan tindakan yaitu sebagai berikut :

1. Pidana dengan syarat
  - Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
  - Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
  - Selama anak menjalani pidana dengan syarat harus mengikuti wajib belajar.
2. Pembinaan diluar lembaga

---

<sup>3</sup> Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
3. Pengawasan
- Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan.
4. Pelatihan kerja
- Pidana pelatihan kerja dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
  - Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pembinaan dalam lembaga
- Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
  - Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
  - Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
  - Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

## 6. Penjara

- Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, jika dihubungkan dengan ancaman ketentuan pidana pada penyalahguna narkotika pasal 127 undang-undang narkotika, maka anak hanya dapat di beri sanksi pidana penjara untuk Narkotika Golongan I dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,
- Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

## 7. Tindakan

- Tindakan dengan Perawatan di LPKS, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, tindakan sebagaimana dimaksud dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

***B. Peran Hakim Dalam Membuktikan Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika  
Pada Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa.***

Dalam konteks Hukum acara pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Membuktikan berarti memperlihatkan bukti atau memperlihatkan dengan bukti atau meyakinkan dengan bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa didalam persidangan pengadilan sesuai prosedur yang berlaku.

Menurut **M. Yahya Harahap**, pembuktian merupakan ketentuan – ketentuan berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang dibenarkan undang – undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan – ketentuan yang mengatur alat – alat bukti yang dibenarkan undang – undang yang boleh digunakan Hakim membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>4</sup>

Adapun peran Hakim dalam membuktikan anak yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sgm yang pada proses penyelesaian perkaranya di pengadilan Negeri Sungguminasa, **Amran S Herman** selaku Hakim pada perkara tersebut sebelum memberikan sanksi pidana pada putusannya telah meyakini dirinya terhadap anak yang bernama **Andre Pareza alias**

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.273

**Reza Bin Ridwan** telah terbukti menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu tanpa hak dan melawan hukum untuk diri sendiri, yakni berlandaskan dari Pasal 183 KUHP yang menyebutkan bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “, adapun rumusan pada pasal tersebut memberikan garis hukum bahwa :

1. Alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya.
3. Keyakinan Hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah, yakni pada pasal 184 KUHP bahwa alat bukti yang sah, yakni: keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, serta keterangan ahli.

Maka dari hal tersebut, Adapun dalam proses pengadilan terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba atas nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan**, Hakim telah memenuhi unsur – unsur pembuktian pada pasal 184 KUHP untuk meyakini dirinya bahwa anak atas nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** terbukti menggunakan narkoba, yakni dari alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa itu sendiri, dan surat sebagai berikut :



## J Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah apabila saksi memberikan keterangan disidang pengadilan dibawah sumpah janji tentang apa yang ia lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya.<sup>5</sup>

Adapun keterangan saksi pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba atas nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan**, Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik yaitu :

Saksi **Yusran Yusuf**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar.
- Bahwa sehingga saksi dihadirkan dipersidangan kerana menemukan anak yang bernama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** membawa Narkoba.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 15 september 2015 sekitar pukul 17:00 wita bertempat di jalan poros Limbung Gowa.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa anak yang bernama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** membawa Narkoba, awalnya pada hari selasa tanggal

---

<sup>5</sup> Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 151

15 september 2015 sekitar pukul 09:00 wita saksi mendapat laporan bahwa rumah bernama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** sering ditempati pesta Narkotika jenis shabu – shabu sehingga saksi bersama anggota yang lain (team) kelokasi yang dimaksud dan sampai ditempat kejadian sekitar pukul 15:00 wita setelah sampai didepan rumah **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan**, informen memberitahu bahwa yang duduk dipinggir kanal adalah anak yang bernama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** sehingga saksi berhenti kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** yang sedang duduk dipinggir kanal dan pada saat saksi dan anggota yang lain turun dari mobil, saksi dan anggota yang lain melihat **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** membuang pembungkus rokok ke kanal.

- Bahwa isi dari pembungkus rokok tersebut, menurut pengakuannya setelah diinterogasi ia peroleh atau beli shabu tersebut dari orang yang bernama **Pak Desa** (nama samaran) di palompong jalan pramuka Kabupaten Gowa seharga Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** membawa shabu tersebut, menurut pengakuannya setelah di interogasi, ia membawa shabu adalah untuk dikonsumsi diri sendiri.
- Bahwa setelah kejadian anggota polisi bersama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** kerumah **Pak Desa** (nama samaran) akan tetapi namun pada saat itu **Pak Desa** (nama samaran) tidak ada dirumahnya.

- Bahwa **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** bukan salah seorang target dari Kepolisian.
- Bahwa **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** tidak punya izin untuk membawa Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat kejadian ada yang ditemani oleh **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** yaitu orang yang bernama **Putra** akan tetapi setelah di interogasi, **Putra** ini berada ditempat tersebut karena dipanggil oleh **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** untuk menyakan kondisi kakaknya **Putra**.
- Bahwa **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** memakai shabu menurut pengakuannya ia sudah kurang lebih 1 (satu) bulan memakai lalu kejadian.
- Bahwa **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** membeli shabu yang ditemukan oleh petugas pada saat kejadian, sesuai pengakuannya shabu tersebut ia beli dari **Pak Desa** (nama samaran) pada hari itu juga sekitar pukul 13:00 wita.

) Keterangan Terdakwa

Dalam hal keterangan terdakwa sebagai alat bukti ialah apabila apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau yang ia alami sendiri.<sup>6</sup>

Adapun keterangan terdakwa pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika atas

---

<sup>6</sup> Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.154

nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan**, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa itu sendiri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehingga Terdakwa diajukan di persidangan adalah masalah Narkotika.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 15 september 2015 sekitar pukul 17:00 wita di jalan poros limbung Kabupaten Gowa.
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu didalam pembungkus rokok sampoerna mild diselokan besar (kanal).
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi di kanal tersebut adalah punya Terdakwa.
- Bahwa sampai shabu - shabu milik Terdakwa tersebut bias berada di kanal karena pada saat Polisi datang Terdakwa yang membuangnya di kanal.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari **Pak Desa** (nama samaran) dengan membeli dengan cara patungan seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang Terdakwa temani membeli shabu tersebut adalah Pahmi yaitu Pahmi Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan anak Rp 100.000; (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak nama sebenarnya **Pak Desa** tersebut, akan tetapi orang – orang semuanya memanggilnya **Pak Desa** (nama samaran).
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari **Pak Desa** (nama samaran) adalah untuk dipakai sendiri guna menghilangkan stress karena sudah tidak diurus oleh kedua orang tuanya.

- Bahwa kedua orang tua Terdakwa sekarang sudah cerai dan masing – masing sudah menikah lagi yaitu bapak sekarang tinggal di Irian Jaya bersama isteri barunya sedangkan ibu anak berada di Polman bersama suami barunya.
- Bahwa Terdakwa memakai shabu kurang lebih 8 (delapan) kali lalu kejadian.
- Bahwa terdakwa mengenal dan memakai shabu kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum kejadian penangkapan.
- Bahwa shabu yang ditemukan oleh petugas pada saat kejadian belum ada yang terdakwa konsumsi.pertama kali mengenalkan anak dengan **Pak Desa** (nama samaran) adalah Pahmi.
- Bahwa terdakwa sering memakai shabu bersama – sama dengan Pahmi.
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti (barang bukti diperlihatkan) adalah barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita oleh Polisi pada saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

) Bukti surat :

Surat yang mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti, yakni surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri disertai tanda tangan dan alasan tentang keterangannya itu.

Adapun Bukti surat yang meyakinkan Hakim terhadap anak bernama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** terbukti menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu digunakan tanpa hak dan melawan hukum, yakni berdasarkan dari surat Hasil pemeriksaan Laboratoris Krimanlistik No.2172/NNF/VII/2015 tanggal 21 september 2015, yang ditanda tangani oleh **Drs. Sulaeman Mappasessu** selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang mengemukakan bahwa Anak atas nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** benar positif menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu (*methafetamina*) yang terlampir dalam jenis narkotika nomor 61 pada undang - undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, berdasarkan hasil pemeriksaan urine di laboratorium forensik Polri cabang makassar.

Selain dari alat – alat bukti yang sah yakni keterangan saksi Yusran Yusuf, keterangan dari terdakwa itu sendiri **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan**, dan bukti surat dari laboratorium forensik Polri cabang Makassar. Hakim untuk meyakinkan dirinya membuktikan anak yang menyalahgunakan narkotika atas nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** perlu juga adanya Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan untuk menguatkan keyakinan Hakim terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika tersebut. Adapun barang bukti yang dipakai dalam perkara **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** yakni sebagai berikut :

) Barang bukti :

Barang Bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Agar dapat dijadikan sebagai bukti, maka benda - benda tersebut dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan Negeri.

Adapun keterangan terdakwa pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba atas nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan**, yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik klip berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat setelah pemeriksaan 0,1113 gram.
- 1 (satu) Pembungkus rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.

Maka berdasarkan dari alat - alat bukti yang sah yang dihadapkan di hadapan persidangan tersebut yakni keterangan saksi **Yusran Yusuf**, keterangan dari terdakwa itu sendiri **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan**, bukti surat dari laboratorium forensic Polri cabang Makassar, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka sehingga hal - hal tersebutlah yang menjadi dasar Hakim untuk meyakinkan dirinya terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba atas nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu. Dan oleh karena dari alat

bukti yang sah tersebut untuk menyelesaikan proses perkara anak yang menyalahgunakan narkoba pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/PN Sungguminasa, Putusan Hakim menyatakan Anak yang bernama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri serta menjatuhkan pidana kepada Anak yang bernama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dilembaga pembinaan khusus anak (LPKA) untuk mendapatkan pembinaan, pendidikan, serta pelatihan kerja oleh badan penyelenggara pembinaan khusus anak.

***C. Efek Jera Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkoba Pada Penerapan Sanksi Yang Diberikan Oleh Hakim Pada Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/PN Sungguminasa.***

Untuk membahas mengenai adakah dampak efek jera yang ditimbulkan pada penerapan sanksi yang diberikan oleh Hakim terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian efek jera. Efek jera dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu sikap seseorang untuk tidak mau, tidak berani dan tidak mau berbuat lagi perbuatan yang dilakukannya terdahulu disebabkan ganjaran yang dialaminya setelah melakukan perbuatan tersebut. Sederhananya, efek jera dapat juga dikatakan dampak tobat dalam melakukan sesuatu



perbuatan yang dilakukan terdahulu disebabkan adanya hukuman yang pernah didapatkan setelah melakukan perbuatan tersebut.

Efek jera dalam kaitannya terhadap pemberian sanksi oleh Hakim atas perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang merupakan upaya pengharapan seorang Hakim agar seseorang yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum tersebut agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dengan cara memberikan sanksi Hukum pidana. Maka oleh karenanya setiap putusan akhir dari sebuah perkara pidana yang diperiksa dan diadili dipengadilan yang telah terbukti bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum, dalam amar putusan Hakim sudah pasti mencantumkan perintah yang mengandung arti penghukuman. Karena putusan adalah gerbang masuknya seseorang kedalam ranah pembinaan terkait tindak pidana yang dilakukannya agar tidak lagi diulangi.

Dari berbagai putusan yang dilihat pada proses penyelesaian perkara di pengadilan mengenai kasus penyalahgunaan narkoba selalu berhubungan dengan pidana penjara. Menurut **Sahardjo**, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada kabinet kerja I - III (1960- 1963), mengemukakan tujuan pidana penjara dalam putusan Hakim adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana yang dihilangkannya kebebasannya melakukan sesuatu yang dianggap berlawanan dengan aturan, namun juga bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik supaya narapidana tersebut menjadi seorang anggota

masyarakat sosialis Indonesia yang berguna setelah menyelesaikan masa pidananya, karena inti dari tujuan pidana penjara adalah pembinaan.

Berawal dari pendapat **Sahardjo** tersebut, sistem pembinaan yang awalnya adalah bersifat kepenjaraan berganti menjadi sistem pembinaan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat **Bismar Siregar** bahwa peranan Hakim dalam memberikan sanksi tidak hanya menghukum, tetapi mengarahkan sipelanggar hukum tersebut dalam pembinaan kesadaran hukum<sup>7</sup>. Berangkat dari pendapat para pakar hukum tersebut adapun tujuan dari pembedaan pidana yang diatur oleh undang – undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yakni pada pasal 85 yang merumuskan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum ketika dalam putusan Hakim dalam proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik hukum tersebut berupa pidana penjara, maka anak yang dijatuhi pidana penjara tersebut yakni wajib ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak yang sebagai mana dimaksud tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan kerja, serta hak lainnya yang sesuai peraturan perundang – undangan.

Berangkat dari hal tersebut maka pada bagian ini, penulis bertujuan menilai apakah penerapan sanksi yang diberikan oleh Hakim terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN

---

<sup>7</sup> Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar 1*, ( Jakarta: Rajawali, 1989), h. 1

Sungguminasa telah memberikan efek jera pada anak tersebut ataukah sebaliknya penerapan sanksi tersebut untuk memberikan efek jera masi kurang efektif ?

Untuk itu terlebih dahulu penulis memaparkan sanksi hukum dalam Amar putusan Hakim pada proses penyelesaian perkara anak yang menyalahgunakan narkoba kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa atas nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan**, yakni sebagai berikut :

) Amar Putusan

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang - undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, yakni undang - undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mengenai batasan jenis dan masa sanksi yang hanya dapat diberikan pada anak.

Putusan Hakim berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Menyatakan Anak yang bernama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.
- Menjatuhkan pidana kepada Anak yang bernama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik klip berisikan berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu *metafetamina* dengan berat setelah pemeriksaan netto 0,1113 gram, 1(satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) lembar celana levis warna biru, 1(satu) handphone merek Samsung warna silver termasuk sebuah sim card AS. Dirampas untuk dimusnahkan.

Adapun Menurut pendapat penulis bahwa sanksi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu atas nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan**, yakni Hakim yang memberikan sanksi berupa sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama masa 6 (enam) bulan, penulis memandang untuk menimbulkan efek jera pada anak yang menyalahgunakan narkotika tersebut masih kurang efektif terhadap efek jera yang timbul. Pandangan tersebut disebabkan karena singkatnya masa pidana yang diberikan oleh Hakim yang hanya memberikan masa pidana selama 6 (enam) bulan saja. Seharusnya, menurut penulis mengenai masa yang paling efektif untuk menimbulkan efek jera pada anak tersebut Hakim pada perkara tersebut seharusnya memberikan masa pidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dengan masa mendekati 2 (dua) tahun.

Adapun alasan mengapa seharusnya masa pidana yang diberikan terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba atas nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** dengan masa pidana mendekati 2 (dua) tahun, ini disebabkan masa pidana yang hanya dapat diberikan oleh anak dibawah umur dalam undang – undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang bersifat limitatif, yakni 1/2 (satu perdua) dari 4 (empat) tahun ancaman pidana penyalahguna narkoba orang dewasa dalam undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Dengan penjelasan bahwa pada ketentuan undang – undang No.35 tahun 2009 pada pasal 127 ayat 1 huruf a, yakni setiap penyalahguna yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, namun apabila penyalahguna tersebut terbukti ialah anak dibawah umur maka di berlakukannya Asas *Lex specialis derogate legi generalis*, yakni pada ketentuan masa ancaman pidana tersebut dibatasi pada pasal 81 ayat 2 dalam undang – undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengemukakan bahwa pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) hanya dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Selain dari pendapat penulis yang seharusnya Hakim memberikan masa pidana dengan masa mendekati 2 (dua) tahun di lembaga khusus anak (LPKA) terhadap **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan**, seharusnya Hakim pada perkara tersebut juga perlu menyesuaikan setidak – tidaknya masa pidana yang diberikan oleh anak tersebut dari keinginan tuntutan Jaksa penuntut umum yang menuntut anak

tersebut ketika Hakim telah menyatakan terdakwa anak bernama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, jaksa memohon agar Hakim menjatuhkan sanksi pidana pada anak tersebut dengan pidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun.

Adapun selain dari hal tersebut, penulis berpendapat bahwa Hakim dalam memberikan masa pidana seharusnya juga memandang faktor penyebab anak yang menyalahgunakan narkotika atas nama Andre Pareza alias Reza Bin Ridwal yang menurut pengakuannya dihadapan persidangan sehingga ia menggunakan narkotika tersebut dikarenakan guna menghilangkan stress karena sudah tidak lagi diurus dan dibina oleh orang tuanya yang telah bercerai dan tidak lagi tinggal bersamanya. Maka oleh karena pengakuan anak tersebut, sedapat mungkin Hakim diharapkan memberikan rasa kepeduliannya melalui cara pemberian hukuman kepada anak tersebut untuk mengikuti bimbingan moral dan akhlak yang dilakukan oleh Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dalam kurung waktu yang tidak terbilang singkat, agar didalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut mendapatkan kepedulian dengan pemberian pembinaan yang serius ketika anak tersebut tidak lagi terurus oleh orang tuanya.

Catatan penting yang perlu diketahui pula, Pada pasal 81 ayat 1 undang – undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengemukakan

bahwa anak yang dijatuhi Pidana Penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak tersebut dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena hal tersebut, ini sejalan dengan persepsi penulis terkait dengan anak yang menyalahgunakan narkoba atas nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** jika melihat keadaan anak tersebut yang tidak lagi terurus oleh orang tuanya dan jika diketahui dari akibat yang akan timbul oleh orang yang menyalahgunakan narkoba akan berdampak membahayakan masyarakat lainnya, maka sudah tepat anak tersebut diberikan pidana penjara di lembaga khusus anak (LPKA).

Perlu pula diketahui pada pasal 85 undang – undang No.11 tahun 2012, Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) menjamin terhadap setiap anak yang berkonflik dengan hukum yang menjalani masa pidana di tempat tersebut akan mendapatkan pembinaan yang serius berupa pendidikan, pelatihan kerja, bimbingan moral, bimbingan akhlak dan pendampingan dari pekerja kesejahteraan anak, serta tidak membatasi hak - haknya antara lain mengenai hak mendapatkan pertumbuhan dan perkembangannya, baik fisik, mental, maupun sosial. Sistem pembinaan terhadap anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) adalah sistem pembinaan yang bertujuan tidaklah semata – mata untuk menghukum anak tersebut, melainkan memberikan bimbingan dan pengarahan yang benar agar si anak tidak menjadi

terganggu jiwa dan mentalnya selama menjalani masa pidananya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).<sup>8</sup>

Berdasarkan Uraian tersebut dikaitkan terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba atas nama **Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan** untuk mendapatkan efektifitas dari implementasi pasal 85 undang – undang sistem peradilan pidana anak tersebut, maka seharusnya Hakim perlu memberikan masa pembinaan tersebut dengan masa yang tidak terbilang singkat. Agar anak tersebut ketika menyelesaikan masa pidananya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selain efek jera yang sudah pasti akan timbul, dengan masa pidana yang tidak terbilang singkat tersebut, anak tersebut kelak menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna setelah menyelesaikan masa pidananya.



---

<sup>8</sup> Tolib Setiady, *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.214



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa yang dapat dijatuhkan oleh Hakim tidak hanya terbatas pada ancaman pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 127 undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, tetapi hakim juga dalam menjatuhkan sanksi pada putusannya wajib berpedoman sebagaimana diatur dalam pasal 71 undang – undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang merumuskan bahwa terhadap anak dibawah umur hanya dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi Pidana dan tindakan yakni tindakan pengembalian ke orangtua, pidana peringatan, pidana dengan syarat, pidana dengan pemberian pelatihan kerja, pidana dengan pemberian pembinaan dalam lembaga, serta pidana penjara yang hanya dapat diberi masa paling lama 1/2 dari ancaman pidana orang dewasa.
2. Peran Hakim dalam membuktikan anak yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa yakni dilandaskan pada Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang –

kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, Dan turut serta pula berlandaskan dari pemenuhan unsur – unsur pada pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah, yakni: keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, serta keterangan ahli . Maka oleh karena dari keterangan saksi Yusran , keterangan dari terdakwa itu sendiri Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan, bukti surat dari laboratorium forensic Polri cabang Makassar, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Hakim pun meyakinkan dirinya terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika atas nama Andre Pareza Alias Reza Bin Ridwan telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu.

3. Efek jera yang ditimbulkan pada penerapan sanksi yang diberikan oleh Hakim terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa, yakni Hakim yang memberikan sanksi dalam putusannya berupa sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama masa 6 (enam) bulan, penulis memandang masa pidana yang diberikan Hakim tersebut untuk menimbulkan Efek jera terhadap anak tersebut masih terbilang kurang efektif. Sebab penulis memandang masa pidana yang diberikan oleh Hakim tersebut terbilang singkat, seharusnya Hakim sedapat mungkin memberikan masa pidana mendekati 2 (dua) tahun. Alasan mengenai masa mendekati 2 (dua) tahun tersebut di landaskan dari hasil 1/2 (satu perdua) dari ketentuan masa pidana bagi anak yang bersifat limitatif terhadap 4

(empat) tahun ancaman pidana penyalahguna narkoba orang dewasa. Selain dari itu pula Hakim seharusnya memandang substansi dari pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses pemidanaannya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut akan mendapatkan pembinaan yang komplit yakni berupa pembinaan moral dan akhlak, pendidikan serta pelatihan kerja agar kelak setelah menyelesaikan masa pidananya, anak tersebut diharapkan dapat kembali menjadi generasi muda yang bermanfaat bagi penerus bangsa. Oleh karenanya Hakim pada perkara tersebut seharusnya memberikan masa pidana yang tidak terbilang singkat – pada penerapan sanksinya agar anak tersebut selama masa pidananya dapat betul – betul mendapatkan pembinaan yang serius sehingga tidak lagi ingin melakukan perbuatannya terdahulu.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Adapun implikasi dari penelitian yang dapat penulis berikan sehubungan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

- Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, karena kedudukan keluarga merupakan salah satu tempat yang paling utama dalam perkembangan si anak, terutama orang tua harus lebih memberikan moral dan pelajaran agama bagi si anak agar tidak melakukan tindak pidana.

- Perlu adanya penyatuan visi oleh aparat penegak hukum antara penyidik, jaksa penuntut umum, hakim anak, pekerja pembinaan anak, serta pekerja sosial anak terhadap penanganan penyelesaian perkara anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika agar mendapatkan perhatian yang serius mengenai proses penyelesaian perkaranya sedapat mungkin anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika tersebut mendapatkan pembinaan yang serius agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan mendukung pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika yang sekarang sudah termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Makarao, Taufik, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ismail, Wahyuni. *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar: Alauddin university pers, 2014.
- Rey, Oakley dan Charles Ksir, *Drugs, society, and human behavior*, New York: Mc Graw Hill Higger Education, 2004.
- Hakim, M. Arief, *Bahaya Narkoba- Alkohol: cara islam mencegah, mengatasi dan melawan*, Bandung: Nuansa, 2004.
- Setiawan, Marwan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Kvaraceus, C.William, *Dynamics of Delinquency*, Colombus: E.Merrils Books, 1966.
- Ross, Alf, *On quilt, Responsibility and Punishment*, London: Steven and Sons Ltd, 1995
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama, 2008.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTKI Jakarta, 2016.
- Prasetya, Teguh. *kriminalisasi dalam Hukum pidana*, Bandung: Nusa media, 2013..
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Aims, dkk. *Hukum Pidana*, Malang: Setara pres, 2016.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Marpaung, Leden, *Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009..

Harahap, M. Yahya *Pembahasan dan penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Makassar: Mitra wacana media, 2014.

Syamsuddin, Rahman, *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Siregar, Bismar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar 1*, Jakarta: Rajawali, 1989.

Setiady, Tolib, *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana dan ICCE uin Jakarta, 2012 Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Semarang: Karya toha semarang, 2002.

*Himpunan Lengkap Undang – Undang Narkotika dan Psikotropika*, Jogjakarta: Saufa, 2014.

Tim Kashiko, *Kamus Praktis Ilmiah*, Surabaya: Bushido Indonesia, 2012.

Negara, Alamsyah Citra, *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak, Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.

#### **Peraturan Perundang – undangan :**

Undang - Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang – Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa perkara pidana Nomor. 24/Pid.Sus-Anak/2015 PN Sgm.

**Website/internet :**

Anshori dhio , 2013, *peradilan anak : artikel peradilan anak*,  
[www.peradilananak.blogspot.com](http://www.peradilananak.blogspot.com) (diakses 25 mei 2016, 22.15 WITA).

Abu Azzam Hawari, 2014, *Petaka dibalik narkoba*,  
<https://kafilatauhid.wordpress.com/petaka-di-balik-narkoba/> (diakses 28 mei 2016, 20.00 WITA).

Reynaldi J, 2013, *sanksi hukum*,  
<http://unhaslaw.blogspot.com//2013/09/penjelasan-mengenai-sanksi-hukum./>  
(diakses 23 juni 2016, 16.00 WITA).







## RIWAYAT HIDUP



**HAIDIR ALI**, Dilahirkan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 1994. Anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Drs. Abd Mansyur Sarro dan Hj. St Aisyah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tidung Makassar pada tahun 2006, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 33 Makassar dan tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 11 Makassar pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Fakultas Syariah dan Hukum pada program studi Ilmu Hukum konsentrasi Pidana. Penulis selama menduduki bangku perkuliahan pernah bergabung dalam organisasi yakni diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum tepatnya sebagai wakil sekretaris umum periode 2015 – 2016, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dan pemerhati lingkungan Wana Lestari Indonesia (WALARI). Penulis menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada tahun 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R